



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA- 077.01.1.653910/2017**



DS.8370-0944-1501-3035

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(077)	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. Unit Organisasi	:	(01)	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(653910)	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Sebesar	:	Rp. 264.274.483.000	(DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	264.274.483.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA I	(018) Rp.	264.274.483.000
-------------------	-----------	-----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

JAKARTA, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017



DS:8370-0944-1501-3035

Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	264.274.483.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	19.322.500.000
03.04	PERADILAN	Rp.	244.951.983.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017



DS:8370-0944-1501-3035

Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	Rp.	140.343.796.000
01.3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	Rp.	23.975.541.000
01.3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	Rp.	3.150.371.000
01.3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp.	52.700.402.000
01.5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	Rp.	60.517.482.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	Rp.	9.536.500.000
02.3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp.	9.536.500.000
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	Rp.	95.071.687.000
06.3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya	Rp.	95.071.687.000
07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp.	19.322.500.000
07.3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	Rp.	19.322.500.000

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kuasa Pengguna Anggaran : Rubiyo
Bendahara Pengeluaran : Santi Widiastuti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tatang Garjito

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		264.274.483.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		19.322.500.000
	03.04	PERADILAN		244.951.983.000
2 Program	077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI		140.343.796.000
Hasil (Outcome)	01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara Konstitusi		
	02	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global		
IKU Program	01	Predikat Capaian Kinerja Lembaga		
	02	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi		
	03	Opini Laporan Keuangan		
	04	Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai		
	05	Indeks Layanan Administrasi Umum		
	06	Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan		
	07	Presentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti		
	08	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional		
Kegiatan	3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah		23.975.541.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Tingkat Layanan Hubungan Masyarakat		
	002	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri		
	003	Tingkat Layanan Perpustakaan		
	004	Persentase Tersusunnya Laporan Layanan Informasi Penanganan Perkara Konstitusi		
	005	Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Protokol		
	006	Persentase Mou/SPK yang ditindaklanjuti		
Keluaran (Output)	3366.002	Terselenggaranya Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	5,00 Paket	13.143.884.000
	3366.004	Layanan Informasi Penanganan Perkara Konstitusi	1,00 Layanan	74.600.000
	3366.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1,00 Layanan	4.624.557.000
	3366.962	Layanan Umum	1,00 Layanan	372.000.000
	3366.994	Layanan Perkantoran	12,00 Bulan	5.760.500.000

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kuasa Pengguna Anggaran : Rubiyo
Bendahara Pengeluaran : Santi Widiastuti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tatang Garjito

Halaman : I A. 2

Kegiatan	3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana		3.150.371.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran		
	002	Persentase Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran		
	003	Persentase Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial		
	004	Persentase Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi		
	005	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Program Kerja dan Anggaran		
	006	Persentase Tersusunnya Pedoman Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial		
Keluaran (Output)	3367.952	Layanan Perencanaan	1,00 Layanan	2.180.000.000
	3367.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00 Layanan	512.233.000
	3367.960	Layanan Manajemen Organisasi	1,00 Layanan	106.000.000
	3367.961	Layanan Reformasi Birokrasi	1,00 Layanan	322.637.000
	3367.965	Layanan Audit Internal	1,00 Layanan	30.701.000
Kegiatan	3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi		52.700.402.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Persentase Penyesuaian Laporan BMN Hasil Rekonsiliasi		
	002	Tingkat Layanan Arsip dan Naskah Dinas		
	003	Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan		
	004	Tingkat Gangguan Keamanan		
Keluaran (Output)	3369.956	Layanan Manajemen BMN	1,00 Layanan	258.259.000
	3369.962	Layanan Umum	1,00 Layanan	223.737.000
	3369.994	Layanan Perkantoran	12,00 Bulan	52.219.006.000
Kegiatan	5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian		60.517.482.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Diklat Teknis Penyertaan yang Diselenggarakan		
	002	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian		
	003	Persentase Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara		
	004	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan		
	005	Jumlah peserta yang mengikuti program rintisan gelar S2 dan S3		
	006	Persentase Tersusunnya Dokumen Daftar Urut Kepangkatan Pegawai		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kuasa Pengguna Anggaran : Rubiyo
Bendahara Pengeluaran : Santi Widiastuti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tatang Garjito

Halaman : I A. 3

Indikator Kinerja Kegiatan	007	Persentase Tersusunnya Laporan Penerbitan SPM		
	008	Persentase Tersusunnya Laporan Pelayanan Poliklinik MK		
	009	Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan yang diikuti Pegawai		
	010	Persentase Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan		
	011	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Internship ke MK Luar Negeri		
	012	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah		
	013	Jumlah Pegawai yang mengikuti Recharging Program		
	014	Jumlah Kegiatan Diklat Kepaniteraan		
Keluaran (Output)	5238.954	Layanan Manajemen SDM	1,00 Layanan	9.572.135.000
	5238.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00 Layanan	155.757.000
	5238.994	Layanan Perkantoran	12,00 Bulan	50.789.990.000
Program	077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI		9.536.500.000
Hasil (Outcome)	01	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		
IKU Program	01	Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi		
	02	Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi		
	03	Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana		
Kegiatan	3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana		9.536.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Persentase Renovasi/Rehabilitasi/Pengembangan Gedung Kantor dan Rumah Negara yang Tepat Waktu		
Keluaran (Output)	3370.951	Layanan Internal (Overhead)	1,00 Layanan	9.536.500.000
Program	077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi		95.071.687.000
Hasil (Outcome)	01	Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi		
	02	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya		
IKU Program	01	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara		
	02	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus		
	03	Persentase Jumlah Perkara PPU Legislatif, PPU Presiden dan Wakil Presiden, PPU Gubernur, PPU Bupati dan PPU Walikota		

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kuasa Pengguna Anggaran : Rubiyo
Bendahara Pengeluaran : Santi Widiastuti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tatang Garjito

Halaman : I A. 4

IKU Program	04	Persentase penyelesaian Kajian Perkara		
	05	Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara		
	06	Persentase tersusunnya usulan rancangan undang-undang MK		
	07	Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi		
Kegiatan	3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya		95.071.687.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus		
	002	Persentase Penyelesaian Kajian Perkara		
	003	Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota		
	004	Persentase Tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK		
	005	Persentase Penyelesaian Risalah Persidangan		
	006	Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara		
	007	Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi		
	008	Persentase Pemuatan Putusan MK dalam Berita Negara		
	009	Persentase Tersusunnya Laporan Dewan Etik		
	010	Persentase Terpenuhiannya Layanan Persidangan Jarak Jauh		
	011	Tingkat Kematangan Sistem Informasi dan Teknologi		
	012	Persentase Pemeliharaan Peralatan ICT Sesuai Rencana		
Keluaran (Output)	3372.001	Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus	207,00 Perkara	10.154.799.000
	3372.002	Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	4,00 Paket	2.948.990.000
	3372.003	Penanganan Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati dan PPHU Walikota yang diputus	138,00 Perkara	52.855.932.000
	3372.004	Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	2,00 PMK	1.219.615.000
	3372.005	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK	12,00 Paket	27.892.351.000
Program	077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		19.322.500.000
Hasil (Outcome)	01	Meningkalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara		
IKU Program	01	Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kuasa Pengguna Anggaran : Rubiyo
Bendahara Pengeluaran : Santi Widiastuti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tatang Garjito

Halaman : I A. 5

Kegiatan	3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK		19.322.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan		
	002	Persentase Tersusunnya Laporan Diseminasi dan Publikasi Perkembangan Perkara Konstitusi dan Putusan MK		
	003	Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara		
	004	Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara		
	005	Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi		
	006	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Bagi Peserta Diklat)		
	007	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Tokoh Masyarakat/ Penyelenggara Pemilu		
	008	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Mahasiswa		
	009	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan se-Indonesia		
	010	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Penyelenggara Negara Pusat dan Daerah		
	011	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Guru dan Dosen		
	012	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Kemasyarakatan		
	013	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pengajaran Mata Kuliah serta Praktik Hukum Acara Peradilan Konstitusi di Perguruan Tinggi		
	014	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Masyarakat Hukum Adat		
	015	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Perempuan/ Kesetaraan Gender		
Keluaran (Output)	3373.001	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	23,00 Kegiatan	14.177.293.000
	3373.002	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	3,00 Paket	5.145.207.000

JAKARTA, 07 Desember 2016
SEKRETARIS JENDERAL

ttt.
M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017**



DS:8370-0944-1501-3035

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Halaman : I B. 1

		Rp.	264.274.483.000	Ket :		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2017				a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni			264.274.483.000	(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNBP			0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0	(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung			0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS			0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Ccst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017**



DS:8370-0944-1501-3035

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA					LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	45.823.180	208.274.803	10.176.500	-	-	264.274.483	
077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	45.823.180	94.520.616	-	-	-	140.343.796	
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	-	23.975.541	-	-	-	23.975.541	
3366.002	Terselenggaranya Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	13.143.884	-	-	-	13.143.884	01.51
01	RM	-	13.143.884	-	-	-	13.143.884	018
3366.004	Layanan Informasi Penanganan Perkara Konstitusi	-	74.600	-	-	-	74.600	01.51
01	RM	-	74.600	-	-	-	74.600	018
3366.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	-	4.624.557	-	-	-	4.624.557	01.51
01	RM	-	4.624.557	-	-	-	4.624.557	018
3366.962	Layanan Umum	-	372.000	-	-	-	372.000	01.51
01	RM	-	372.000	-	-	-	372.000	018
3366.994	Layanan Perkantoran	-	5.760.500	-	-	-	5.760.500	01.51
01	RM	-	5.760.500	-	-	-	5.760.500	018

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	-	3.150.371	-	-	-	3.150.371		
3367.952	Layanan Perencanaan	-	2.180.000	-	-	-	2.180.000	01.51	
01	RM	-	2.180.000	-	-	-	2.180.000	018	
3367.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	512.233	-	-	-	512.233	01.51	
01	RM	-	512.233	-	-	-	512.233	018	
3367.960	Layanan Manajemen Organisasi	-	106.000	-	-	-	106.000	01.51	
01	RM	-	106.000	-	-	-	106.000	018	
3367.961	Layanan Reformasi Birokrasi	-	322.037	-	-	-	322.037	01.51	
01	RM	-	322.037	-	-	-	322.037	018	
3367.965	Layanan Audit Internal	-	30.101	-	-	-	30.101	01.51	
01	RM	-	30.101	-	-	-	30.101	018	
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	-	52.700.402	-	-	-	52.700.402		
3369.956	Layanan Manajemen BMN	-	258.259	-	-	-	258.259	01.51	
01	RM	-	258.259	-	-	-	258.259	018	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017**



DS:8370-0944-1501-3035

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3369.962	Layanan Umum	-	223.137	-	-	-	223.137	01.51	
01	RM	-	223.137	-	-	-	223.137	018	
3369.994	Layanan Perkantoran	-	52.219.006	-	-	-	52.219.006	01.51	
01	RM	-	52.219.006	-	-	-	52.219.006	018	
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	45.823.180	14.694.302	-	-	-	60.517.482		
5238.954	Layanan Manajemen SDM	-	9.572.135	-	-	-	9.572.135	01.51	
01	RM	-	9.572.135	-	-	-	9.572.135	018	
5238.955	Layanan Manajemen Keuangan	-	155.757	-	-	-	155.757	01.51	
01	RM	-	155.757	-	-	-	155.757	018	
5238.994	Layanan Perkantoran	45.823.180	4.966.410	-	-	-	50.789.590	01.51	
01	RM	45.823.180	4.966.410	-	-	-	50.789.590	018	
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	-	-	9.536.500	-	-	9.536.500		
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	9.536.500	-	-	9.536.500		
3370.951	Layanan Internal (Overhead)	-	-	9.536.500	-	-	9.536.500	01.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017**



DS:8370-0944-1501-3035

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	-	9.536.500	-	-	9.536.500	018	
077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	-	94.431.687	640.000	-	-	95.071.687		
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya	-	94.431.687	640.000	-	-	95.071.687		
3372.001	Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus	-	10.154.799	-	-	-	10.154.799	01.51	
01 RM		-	10.154.799	-	-	-	10.154.799	018	
3372.002	Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	-	2.308.990	640.000	-	-	2.948.990	01.51	
01 RM		-	2.308.990	640.000	-	-	2.948.990	018	
3372.003	Penanganan Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati dan PPHU Walikota yang diputus	-	52.855.932	-	-	-	52.855.932	01.51	
01 RM		-	52.855.932	-	-	-	52.855.932	018	
3372.004	Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	-	1.219.615	-	-	-	1.219.615	01.51	
01 RM		-	1.219.615	-	-	-	1.219.615	018	
3372.005	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK	-	27.892.351	-	-	-	27.892.351	01.51	
01 RM		-	27.892.351	-	-	-	27.892.351	018	
077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	19.322.500	-	-	-	19.322.500		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017**



DS:8370-0944-1501-3035

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	-	19.322.500	-	-	-	19.322.500		
3373.001	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	-	14.177.293	-	-	-	14.177.293	01 . 51	
01	RM	-	14.177.293	-	-	-	14.177.293	018	
3373.002	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	-	5.145.207	-	-	-	5.145.207	01 . 51	
01	RM	-	5.145.207	-	-	-	5.145.207	018	
JUMLAH		45.823.180	208.274.803	10.176.500	-	-	264.274.483		

JAKARTA, 07 Desember 2016
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Salter : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.633.927	7.281.593	10.830.598	15.591.255	16.040.508	19.420.682	28.345.819	27.525.395	30.964.339	28.482.785	33.124.322	42.033.260	264.274.483
		51 BELANJA PEGAWAI	2.676.074	2.717.315	2.960.177	3.766.665	3.615.449	5.562.934	4.330.291	4.000.364	5.402.553	2.653.162	4.041.604	4.096.592	45.823.180
		52 BELANJA BARANG	1.916.129	4.248.806	7.456.237	11.413.459	11.996.628	13.329.588	23.139.331	22.514.505	24.409.806	24.909.667	27.887.997	35.052.650	208.274.803
		53 BELANJA MODAL	41.724	315.472	414.184	411.131	428.431	528.160	876.197	1.010.526	1.151.980	919.956	1.194.721	2.884.018	10.176.500
	077.01.01.3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risdalah	220.575	489.101	858.324	1.313.860	1.380.991	1.534.435	2.663.683	2.591.756	2.809.933	2.867.475	3.210.325	4.035.083	23.975.541
		52 BELANJA BARANG	220.575	489.101	858.324	1.313.860	1.380.991	1.534.435	2.663.683	2.591.756	2.809.933	2.867.475	3.210.325	4.035.083	23.975.541
	077.01.01.3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	28.983	64.268	112.783	172.640	181.461	201.624	350.006	340.555	369.223	376.784	421.835	530.209	3.150.371
		52 BELANJA BARANG	28.983	64.268	112.783	172.640	181.461	201.624	350.006	340.555	369.223	376.784	421.835	530.209	3.150.371
	077.01.01.3369	Pengelolaan Kerumah Tanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	484.844	1.075.088	1.886.674	2.887.982	3.035.543	3.372.826	5.855.015	5.696.913	6.176.487	6.302.968	7.056.584	8.869.478	52.700.402
		52 BELANJA BARANG	484.844	1.075.088	1.886.674	2.887.982	3.035.543	3.372.826	5.855.015	5.696.913	6.176.487	6.302.968	7.056.584	8.869.478	52.700.402
	077.01.01.5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	2.811.262	3.017.079	3.486.233	4.571.913	4.461.841	6.503.369	5.962.828	5.588.818	7.124.725	4.410.601	6.009.171	6.569.642	60.517.482
		51 BELANJA PEGAWAI	2.676.074	2.717.315	2.960.177	3.766.665	3.615.449	5.562.934	4.330.291	4.000.364	5.402.553	2.653.162	4.041.604	4.096.592	45.823.180
		52 BELANJA BARANG	135.188	299.764	526.056	805.248	846.392	940.435	1.632.537	1.588.454	1.722.172	1.757.439	1.967.567	2.473.050	14.694.302
	077.01.02.3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	23.807	180.002	236.325	234.583	244.454	301.357	499.940	576.585	657.296	524.908	681.683	1.645.560	5.806.500
		53 BELANJA MODAL	23.807	180.002	236.325	234.583	244.454	301.357	499.940	576.585	657.296	524.908	681.683	1.645.560	5.806.500
	077.01.02.3371	Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	15.293	115.630	151.811	150.692	157.033	193.587	321.153	370.389	422.236	337.192	437.902	1.057.082	3.730.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SE_URUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		53 BELANJA MODAL	15.293	115.630	151.811	150.692	157.033	193.587	321.153	370.389	422.236	337.192	437.902	1.057.082	3.730.000
077.01.06.3372		Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya	871.396	1.946.246	3.406.702	5.200.712	5.466.209	6.076.844	10.546.464	10.271.617	11.139.842	11.351.886	12.719.539	16.074.230	95.071.687
		52 BELANJA BARANG	868.772	1.926.406	3.380.654	5.174.856	5.439.265	6.043.628	10.491.360	10.208.065	11.067.394	11.294.030	12.644.403	15.892.854	94.431.687
		53 BELANJA MODAL	2.624	19.840	26.048	25.856	26.944	33.216	55.104	63.552	72.448	57.856	75.136	181.376	640.000
077.01.07.3373		Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	177.767	394.179	691.746	1.058.873	1.112.976	1.236.640	2.146.730	2.088.762	2.264.597	2.310.971	2.587.283	3.251.976	19.322.500
		52 BELANJA BARANG	177.767	394.179	691.746	1.058.873	1.112.976	1.236.640	2.146.730	2.088.762	2.264.597	2.310.971	2.587.283	3.251.976	19.322.500
		PERKIRAAN PENERIMAAN	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.127	769.436
		- PNPB (423119)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
		- PNPB (423129)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
		- PNPB (423141)	62.036	62.036	62.036	62.036	62.036	62.036	62.036	62.036	62.036	62.036	62.036	62.040	744.436

JAKARTA, 07 Desember 2016
SEKRETARIS JENDERAL

ttt.
M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 077.01.1.653910/2017
IV. C A T A T A N**



DS:8370-0944-1501-3035

Kementerian Negara/Lembaga : [077] MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Organisasi : [01] MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Saker : [653910] MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI		
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI		
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana		
3370.951	Layanan Internal (Overhead)		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)		
Catatan	Renovasi/pengembangan gedung Arsip dan Inventaris sebanyak1 Paket sebesar Rp5.306.500.000,-		

JAKARTA, 07 Desember 2016
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA-077.01-0/2017**



DS:4975-3207-0400-3930

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 3. PAGU | : | Rp.264.274.483.000 |
- (DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

JAKARTA, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI
NIP.196606111992021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017



DS:4975-3207-0400-3930

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI	:	077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU	:	Rp.264.274.483.000 (DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	140.343.796
		02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	9.536.500
		06 Program Penanganan Perkara Konstitusi	95.071.687
		07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	19.322.500
2. SASARAN STRATEGIS	:	01 Meningkatnya Pelayanan Penanganan Perkara dan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	
	:	02 Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	:	03 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	
3. FUNGSI	:	03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	264.274.483
SUB FUNGSI	:	0303 PEMBINAAN HUKUM	19.322.500
	:	0304 PERADILAN	244.951.983
4. PRIORITAS	:		
Non Prioritas	:	00 -	

JAKARTA, 07 Desember 2016
SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001



DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017



DS:4975-3207-0400-3930

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
077.01 J1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara Konstitusi Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global 01 Predikat Capaian Kinerja Lembaga 02 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 03 Opini Laporan Keuangan 04 Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai 05 Indeks Layanan Administrasi Umum 06 Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan 07 Presentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti 08 Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional		140.343.796
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah - Tingkat Layanan Hubungan Masyarakat - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri - Tingkat Layanan Perpustakaan - Persentase Tersusunnya Laporan Layanan Informasi Penanganan Perkara Konstitusi - Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Protokol - Persentase Mou/SPK yang ditindaklanjuti		23.975.541
3366.002	Terselenggaranya Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	0 0	5.0000 Paket 13.143.884
3366.004	Layanan Informasi Penanganan Perkara Konstitusi	0 0	1.0000 Layanan 74.600
3366.058	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	0 0	1.0000 Layanan 4.624.557
3366.062	Layanan Umum	0 0	1.0000 Layanan 372.000
3366.094	Layanan Perkantoran	0 0	12.0000 Bulan 5.760.500
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana - Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran - Persentase Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran - Persentase Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial - Persentase Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi		3.150.371

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISI ANGGARAN PELAKSANAAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017



DS:4975-3207-0400-3930

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT		VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
3367.452	- Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Program Kerja dan Anggaran - Persentase Tersusunnya Pedoman Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial Layanan Perencanaan	0 0	1.0000 Layanan	2.180.000
3367.453	Layanan Pemanfaatan dan Evaluasi	0 0	1.0000 Layanan	512.233
3367.460	Layanan Manajemen Organisasi	0 0	1.0000 Layanan	106.000
3367.461	Layanan Reformasi Birokrasi	0 0	1.0000 Layanan	322.037
3367.465	Layanan Audit Internal	0 0	1.0000 Layanan	30.101
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi - Persentase Penyesuaian Laporan BMN Hasil Rekonsiliasi - Tingkat Layanan Arsip dan Naskah Dinas - Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan - Tingkat Gangguan Keamanan			52.700.402
3369.456	Layanan Manajemen BMN	0 0	1.0000 Layanan	258.259
3369.462	Layanan Umum	0 0	1.0000 Layanan	223.137
3369.494	Layanan Perkantoran	0 0	12.0000 Bulan	52.219.006
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian - Jumlah Diklat Teknis Penyertaan yang Diselenggarakan - Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian - Persentase Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara - Tingkat Layanan Administrasi Keuangan - Jumlah peserta yang mengikuti program rintisan gelar S2 dan S3 - Persentase Tersusunnya Dokumen Daftar Urut Kepangkatan Pegawai - Persentase Tersusunnya Laporan Penerbitan SPM - Persentase Tersusunnya Laporan Pelayanan Poliklinik MK - Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan yang diikuti Pegawai - Persentase Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan - Jumlah Pegawai yang Mengikuti Internship ke MK Luar Negeri - Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah - Jumlah Pegawai yang mengikuti Recharging Program - Jumlah Kegiatan Diklat Kepaniteraan			60.517.482

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017



DS:4975-3207-0400-3930

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 4 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT		VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
5238.054	Layanan Manajemen SDM	0 0	1.0000 Layanan	9.572.135
5238.055	Layanan Manajemen Keuangan	0 0	1.0000 Layanan	155.757
5238.094	Layanan Perkantoran	0 0	12.0000 Bulan	50.789.590
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 01 Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi 02 Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi 03 Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana			9.536.500
3270	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana - Persentase Renovasi/Rehabilitasi/Pengembangan Gedung Kantor dan Rumah Negara yang Tepat Waktu			9.536.500
3370.051	Layanan Internal (Overhead)	0 0	1.0000 Layanan	9.536.500
077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya 01 Indeks Pelayanan Penanganan Perkara 02 Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 03 Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati dan PHPU Walikota 04 Presentase penyelesaian Kajian Perkara 05 Presentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara 06 Presentase tersusunnya usulan rancangan undang-undang MK 07 Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi			95.071.687
3272	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya - Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus - Presentase Penyelesaian Kajian Perkara - Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota - Presentase Tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK - Presentase Penyelesaian Risalah Persidangan			95.071.687

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISI ANGGARAN PELAKSANAAN (DIPA) INDIK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
3372.001	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara - Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi - Persentase Pemuatan Putusan MK dalam Berita Negara - Persentase Tersusunnya Laporan Dewan Etik - Persentase Terpenuhi Layanannya Persidangan Jarak Jauh - Tingkat Kematangan Sistem Informasi dan Teknologi - Persentase Pemeliharaan Peralatan ICT Sesuai Rencana 	0 0	207.0000 Perkara
3372.002	Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus	0 0	4.0000 Paket
3372.003	Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	0 0	138.0000 Perkara
3372.004	Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati dan PHPU Walikota yang diputus	0 0	2.0000 PMK
3372.005	Peraturan MK dan Pelunjuk Teknis	0 0	12.0000 Paket
3372.005	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK	0 0	
077.01.07	<p>Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</p> <p>Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>01 Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</p>		19.322.500
3373	<p>Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan - Persentase Tersusunnya Laporan Diseminasi dan Publikasi Perkembangan Perkara Konstitusi dan Putusan MK - Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara - Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara - Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi - Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Bagi Peserta Diklat) - Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Tokoh Masyarakat/ Penyelenggara Pemilu - Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Mahasiswa - Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan se-Indonesia - Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Penyelenggara Negara Pusat dan Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Guru dan Dosen - Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Kemasyarakatan - Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pengajaran Mata Kuliah serta Praktik Hukum Acara Peradilan Konstitusi di 		19.322.500

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud bertaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017



DS:4975-3207-0400-3930

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU : Rp.264.274.483.000
(DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI		45.823.180	94.520.616	0	0	140.343.796	0
	01	DKI JAKARTA		45.823.180	94.520.616	0	0	140.343.796	0
	E53910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	KP	45.823.180	94.520.616	0	0	140.343.796	0
	A00	RM		45.823.180	94.520.616	0	0	140.343.796	0
		Target Pendapatan						769.436	
	077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI		0	0	9.536.500	0	9.536.500	0
	01	DKI JAKARTA		0	0	9.536.500	0	9.536.500	0
	E53910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	KP	0	0	9.536.500	0	9.536.500	0
	A00	RM		0	0	9.536.500	0	9.536.500	0
	077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi		0	94.431.687	640.000	0	95.071.687	0
	01	DKI JAKARTA		0	94.431.687	640.000	0	95.071.687	0
	E53910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	KP	0	94.431.687	640.000	0	95.071.687	0
	A00	RM		0	94.431.687	640.000	0	95.071.687	0
	077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		0	19.322.500	0	0	19.322.500	0
	01	DKI JAKARTA		0	19.322.500	0	0	19.322.500	0
	E53910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	KP	0	19.322.500	0	0	19.322.500	0
	A00	RM		0	19.322.500	0	0	19.322.500	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017



DS:4975-3207-0400-3930

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU : Rp.264.274.483.000
(DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
		TOTAL		45.823.180	208.274.803	10.176.500	0	264.274.483	0
		RM		45.823.180	208.274.803	10.176.500	0	264.274.483	0
		PENDAPATAN						769.436	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

JAKARTA, 07 Desember 2016
SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001



DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA-077.01-0/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU : Rp.264.274.483.000

(DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	077.01.41	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI RENCANA PENARIKAN DANA	140.343.796	3.545.664	4.645.536	6.344.014	8.946.395	9.059.836	11.612.254	14.831.532	14.218.042	16.480.368	13.957.828	16.697.915	20.004.412
2	077.01.42	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI RENCANA PENARIKAN DANA	9.536.500	39.100	295.632	388.136	385.275	401.487	494.944	821.093	946.974	1.079.532	862.100	1.119.585	2.702.642
3	077.01.46	Program Penanganan Perkara Konstitusi RENCANA PENARIKAN DANA	95.071.687	871.396	1.946.246	3.406.702	5.200.712	5.466.209	6.076.844	10.546.464	10.271.617	11.139.842	11.351.886	12.719.539	16.074.230
4	077.01.47	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara RENCANA PENARIKAN DANA	19.322.500	177.767	394.179	691.746	1.058.873	1.112.976	1.236.640	2.146.730	2.088.762	2.264.597	2.310.971	2.587.283	3.251.976
5	077.01	PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	769.436	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.127
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	264.274.483	4.633.927	7.281.593	10.830.598	15.591.255	16.040.508	19.420.682	28.345.819	27.525.395	30.964.339	28.482.785	33.124.322	42.033.260
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	769.436	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.119	64.127

JAKARTA, 07 Desember 2016
SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH
NIP 196501081990021001